KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

VOL. 11 NO. 1 | JANUARI - MARET 2026

POLICY BRIEF

Penguatan Indonesianis sebagai Infrastruktur Diplomasi Pengetahuan Indonesia

Analisis terhadap Gagasan Mengangkat HUT Kemlu sebagai Hari Diplomasi Indonesia

DEWAN REDAKSI

PENGARAH
KEPALA BSKLN

PENANGGUNG JAWAB
SEKRETARIS BSKLN

PEMIMPIN REDAKTUR
APUL SIHOMBING

REDAKTUR
1. YOHANA I. MAHARLIKA
2. REINHARDT KLAUSSURINKA
3. M. FATTAH H.H
4. SULTHON SJAHRIL

EDITOR
1. KARIMA TAUSHIA A
2. YUDHI MUHAMMAD F.R
3. ALDILA AVEZINE
4. ERRY HERJUNO
5. VIA FIDE ADITYA A.R

SEKRETARIAT
1. ACHRAM IVEL
2. NURUL UTAMI
3. PURWADI
4. NURMASELLA P



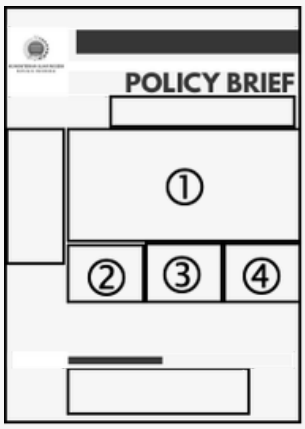






BADAN STRATEGI KEBIJAKAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

GEDUNG ROESLAN ABDUL GHANI, LANTAI 2
JL. TAMAN PEJAMBON NO. 6 JAKARTA PUSAT, 10110
TELP : (021) 3441508



SUMBER GAMBAR / FOTO

1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Gedung Pancasila. https://kemlu.go.id/tentang-kami/bangunan-bersejarah/gedung-pancasila-
2. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Kongres Indonesianis Sedunia ke-7: Menghidupkan kembali semangat Bandung, mendorong kerja sama Selatan-Selatan menuju dunia yang lebih sejahtera dan stabil. https://kemlu.go.id/berita/kongres-indonesianis-sedunia-ke-7-menghidupkan-kembali-semangat-bandung-mendorong-kerja-sama-selatan-selatan-menuju-dunia-yang-lebih-sejahtera-dan-stabil?type=publication
3. StockCake. (n.d.). Handshake seals deal [Gambar]. https://stockcake.com/i/handshake-seals-deal_101822_6332
4. Fassihi, F. (2017, 6 November). U.N. Security Council dials up pressure on Myanmar. The Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/u-n-security-council-dials-up-pressure-on-myanmar-1510015496

POLICY BRIEF

PENGUATAN INDONESIANIS SEBAGAI INFRASTRUKTUR DIPLOMASI PENGETAHUAN INDONESIA

DISETUJUI UNTUK PUBLIKASI

Ringkasan Eksekutif

Indonesia telah memiliki fondasi diplomasi pengetahuan melalui Kongres Indonesianis Sedunia (KIS) dan *dashboard Global Indonesianist Network* (GIN), namun *engagement* masih perlu ditransformasikan dari forum periodik menjadi ekosistem pengetahuan yang aktif sepanjang tahun. Penyusutan studi dan Bahasa Indonesia di sejumlah negara strategis, terutama di Australia, menunjukkan risiko regenerasi Indonesianis. Diperlukan kebijakan terintegrasi untuk mempertahankan Indonesianis senior, melahirkan generasi baru, dan menghubungkan kepakaran mereka dengan diplomasi serta perumusan kebijakan Indonesia, dengan tetap menjaga independensi akademik sebagai sumber kredibilitas. *Policy Brief* ini mengusulkan penyusunan *roadmap Global Indonesianist Partnership* (GIP) 2030 di bawah koordinasi BSKLN, dengan Australia sebagai pilot awal, serta menjaga independensi akademik dan keberlanjutan pembiayaan.

I. Latar Belakang

1. Indonesianis merupakan akademisi, peneliti, analis, profesional, praktisi, atau warga negara asing yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai Indonesia [1]. Dalam konteks diplomasi, mereka dapat berperan sebagai *knowledge multipliers* guna memperluas jangkauan pengetahuan tentang Indonesia melalui jejaring akademik, media, bisnis, dan komunitas kebijakan di negara masing-masing, sekaligus menjadi sumber perspektif eksternal yang dapat memperkaya pemahaman Indonesia mengenai dinamika internasional.
2. Kemlu telah membangun fondasi melalui Kongres Indonesianis Sedunia (KIS) sejak 2018. KIS ke-7 pada November 2025 menempatkan Indonesianis sebagai mitra strategis untuk menjembatani Indonesia dengan komunitas internasional. Sejak 2024, *dashboard Global Indonesianist Network* (GIN) juga dikembangkan sebagai repositori digital. Saat ini, BSKLN tengah memetakan lebih dari 500 Indonesianis dari berbagai negara.

II. Pengamatan

3. Terdapat indikasi risiko regenerasi kepakaran mengenai Indonesia di Australia, salah satu mitra strategis Indonesia. Laporan Parlemen Australia tahun 2026 mencatat *enrolment* domestik pada bahasa-bahasa Asia Tenggara di universitas turun 75% selama 2005-2024, dimana hanya sekitar 500 dari satu juta mahasiswa domestik Australia yang mempelajari Bahasa Indonesia. Pada 2025, 13 universitas masih menawarkan pengajaran Bahasa Indonesia dan hanya sekitar 10 diantaranya mempertahankan program penuh. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kepakaran mengenai Indonesia tidak dapat dianggap akan tumbuh secara alamiah tanpa intervensi kebijakan.
4. *Benchmark* negara lain menunjukkan pola yang konsisten: negara yang berhasil membangun komunitas ahli asing tidak berhenti pada konferensi, tetapi membangun jalur karier dan institusi. Korea Selatan melalui *Korea Foundation* mendukung pembentukan *tenure-track professorship* dan *endowed chair Korean Studies* di universitas asing, termasuk skema di mana universitas penerima mengambil alih pembiayaan setelah periode dukungan awal. Dukungan dilengkapi *local faculty, fellowship*, pelatihan bahasa, dan akses *e-resources*.
5. Jepang melalui *Japan Foundation* menggabungkan *fellowship* peneliti asing, *grants* bagi institusi *Japanese Studies*, penguatan jaringan generasi berikutnya, dan dukungan pengajaran bahasa. Model ini membangun ekosistem dari individu hingga institusi dan secara eksplisit menargetkan pembentukan generasi baru serta jaringan jangka panjang, termasuk melalui skema khusus ASEAN.

[1] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Global Indonesianist Network. https://globalindonesianist.bskln.id/

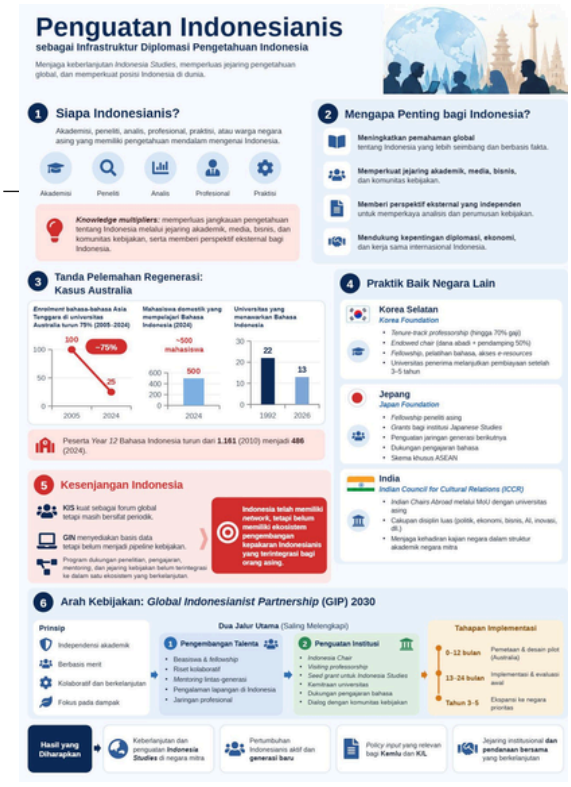
6. India melalui *Indian Council for Cultural Relations* (ICCR) membangun *Indian Chairs Abroad* berdasarkan MoU dengan universitas asing dan rekomendasi Perwakilan India. Pada 2026, ICCR mencatat 60 MoU aktif dengan universitas luar negeri, dimana cakupan kajian tidak terbatas pada bahasa atau budaya, tetapi mencakup politik, ekonomi, bisnis, AI, inovasi, dan bidang strategis lain. Praktik ini memperlihatkan pentingnya *institutional anchor* yang membuat kajian negara tetap hadir dalam struktur akademik negara mitra.
7. Perbandingan tersebut menunjukkan kesenjangan utama Indonesia. KIS memiliki kekuatan sebagai forum global dan GIN menyediakan basis data, namun keduanya belum sepenuhnya menjadi *pipeline policy* yang menghubungkan identifikasi talenta, dukungan penelitian, pengajaran, pengalaman lapangan di Indonesia, mentoring lintas-generasi, hingga jejaring kebijakan. Dengan kata lain, **Indonesia telah memiliki *network*, tetapi belum memiliki *career ecosystem* terpadu bagi orang asing untuk menjadi Indonesianis.**
8. Pendekatan terhadap Indonesianis juga perlu dibedakan dari promosi citra. Indonesianis yang kredibel tidak harus selalu sejalan dengan posisi Pemerintah. Upaya yang terlalu instrumental dapat menurunkan independensi akademik dan justru mengurangi pengaruh mereka. Nilai strategis terbesar muncul ketika ahli yang dipercaya oleh komunitasnya mampu memberi konteks yang akurat mengenai Indonesia, termasuk ketika pandangannya kritis, serta menjadi ***sounding board*** bagi pembuat kebijakan Indonesia.
9. Pengembangan *Global Indonesianist Network* (GIN) dan penyelenggaraan Kongres Indonesianis Sedunia (KIS) merupakan modalitas diplomasi publik yang luar biasa. Namun, ruang optimalisasi masih terbuka lebar guna menggeser orientasi pengelolaan jaringan ini, dari yang semula bersifat administratif-fasilitatif menjadi **kemitraan strategis yang berorientasi pada hasil (*output-driven partnership*).**
10. Tantangan utama terletak pada belum adanya tautan kebutuhan (*demand-supply linkage*) yang mempertemukan keahlian para Indonesianis dengan agenda prioritas nasional, serta absennya peta jalan pembinaan jaringan yang terintegrasi di Kemlu. Agar GIN tidak berhenti sebagai *dashboard* pendataan dan KIS tidak sekadar menjadi forum pertemuan tahunan, Indonesia memerlukan reorientasi strategi jangka pendek hingga jangka panjang yang terukur.

III. Rekomendasi Strategi Kebijakan

11. Mengembangkan ***Global Indonesianist Partnership (GIP)*** sebagai payung kebijakan yang mengintegrasikan KIS dan GIN dengan prinsip ***Preserve – Regenerate – Connect,*** tanpa membentuk badan baru. BSKLN dapat berfungsi sebagai orkestrator dengan melibatkan Perwakilan RI, Kemendiktisaintek, BRIN, LPDP, Badan Bahasa, perguruan tinggi, lembaga riset, filantropi, dan sektor swasta. Fokus bukan pada jumlah kegiatan, tetapi keberlanjutan ekosistem dan dampak terhadap pengetahuan serta jejaring kebijakan.
    - ***Preserve***: menjadikan GIN sebagai *living strategic database* yang memetakan Indonesianis berdasarkan negara, institusi, bidang, generasi, bahasa, produktivitas, dan tingkat *engagement*. Dalam hal ini, Perwakilan RI didorong untuk melakukan pemutakhiran dan *engagement* berkala sepanjang tahun.
    - ***Regenerate***: optimalisasi program beasiswa seperti Kemitraan Negara Berkembang (KNB), *the Indonesian Aid Scholarship* (TIAS), dan skema *visiting reseearcher* BRIN yang sudah berjalan. Kesenjangannya, program-program ini masih bergerak di jalurnya masing-masing secara parsial. Mekanisme ***Indonesia Fellowship for Global Scholars*** dirancang untuk mengintegrasikan modalitas yang ada tersebut ke dalam satu ekosistem kebijakan hulu-hilir: mengikat talenta asing dari sejak beasiswa (*KNB*), mengembangkannya lewat riset kolaboratif (*BRIN*), hingga menempatkan mereka secara permanen pada struktur ***Indonesia Chair*** di universitas prioritas luar negeri lewat mekanisme pendanaan bersama (*co-financing*) yang berkelanjutan.
    - ***Connect***: membentuk *Indonesianist Policy Dialogue* secara reguler dan terbatas (*Chatham House-style*) untuk isu ASEAN, Indo-Pasifik, *Global South,* geoekonomi, demokrasi, Islam, hilirisasi, energi, maritim, dan isu-isu strategis lainnya. Dalam hal ini, Indonesianis berfungsi sebagai *external intellectual sounding board,* bukan juru bicara Pemerintah.
12. Menerapkan **pendekatan portofolio berdasarkan kepentingan strategis, risiko regenerasi, kapasitas institusi, dan peluang *co-funding*.** Intervensi tidak perlu seragam. Pada negara yang telah memiliki tradisi *Indonesia Studies* kuat, fokus diarahkan pada regenerasi dan mempertahankan program yang terancam tutup. Pada negara dengan bobot geopolitik tinggi tetapi kapasitas *Indonesia Studies* rendah, fokus diarahkan pada pembukaan *chair/courses* dan *fellowships*. Pada *Global South,* fokus dapat diarahkan pada jaringan riset bersama

dan isu pembangunan yang memiliki kedekatan pengalaman dengan Indonesia.
Prioritas tahap awal → Australia; Amerika Serikat; Tiongkok; Jepang; Republik Korea; India; negara kunci Eropa; Timur Tengah; serta *emerging partners* di Afrika dan Amerika Latin. Pemilihan akhir didasarkan pada kepentingan politik-ekonomi, *knowledge deficit*, kapasitas institusi lokal, dan peluang *co-funding.*

13. Menjadikan KIS sebagai puncak dari pertemuan jejaring Indonesianis yang aktif. *Working groups* tematik dapat menghasilkan *policy note, joint research, lecture series,* mentoring dan rekomendasi untuk K/L. Lebih lanjut, KIS dapat berfungsi sebagai forum konsolidasi hasil, perluasan jejaring, dan pemberian pengakuan kepada kontribusi Indonesianis lintas generasi.
14. Untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas, implementasi dapat dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan ketersediaan angaran secara efisien:
    a. **Tahap I (0–12 bulan):** audit dan pemutakhiran GIN; pemetaan negara/institusi prioritas; segmentasi *senior–mid career–next generation*; identifikasi program *Indonesia Studies* yang rentan; serta desain *pilot fellowship* dan *seed grant.*
    b.**Tahap II (tahun 1–2):** menjalankan *fellowship/seed grant* pada skala terbatas; membangun 3–5 kemitraan universitas strategis; mengaktifkan *Indonesianist Policy Dialogue*; dan mengintegrasikan Perwakilan RI sebagai *network manager* di negara akreditasi.
    c.**Tahap III (tahun 3–5)**: memperluas program yang terbukti efektif, membangun sejumlah Indonesia *Chair/visiting professorship* dengan skema *co-financing*, serta menciptakan mekanisme alumni dan mentoring lintas-generasi.
15. Indikator keberhasilan perlu bergeser dari *output* kegiatan menjadi *outcome*: pertumbuhan Indonesianis aktif, khususnya generasi muda, jumlah *courses*/program *Indonesia Studies* yang bertahan atau tumbuh, publikasi dan *policy output*; alumni *fellowship* yang tetap menekuni Indonesia, keterwakilan Indonesianis pada universitas, *think tank,* media, pemerintah, dan bisnis, serta pemanfaatan *expertise* mereka oleh Kemlu dan Perwakilan RI.
16. Dari sisi tata kelola, Kemlu sebaiknya tidak menjadi satu-satunya penyandang dana. Model *co-financing* dengan universitas (baik dalam negeri seperti UIII dan PTN-BH lainnya, maupun luar negeri), lembaga filantropi, sektor swasta, dan mitra pendidikan internasional sangat krusial untuk menciptakan *ownership* lokal dan mengurangi risiko ketergantungan finansial. Prinsip transparansi, *merit-based selection,* *academic freedom,* dan *disclosure* sumber pendanaan wajib menjadi syarat mutlak agar program ini memiliki legitimasi internasional yang tidak cacat secara politik..
17. **Arahan Menlu yang diusulkan:** menyetujui penyusunan **<u>roadmap Global Indonesianist Partnership 2030 di bawah koordinasi BSKLN</u>** sebagai transformasi KIS dan GIN dari *event-and-repository platform* menjadi ekosistem diplomasi pengetahuan; dengan mandat awal untuk menyiapkan pemetaan global, *pilot fellowship/seed grant,* dan desain 3–5 kemitraan institusional pada negara prioritas. Prinsip utama: **Indonesia tidak cukup hanya dikenal; Indonesia perlu dipahami.**



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Kuesioner Kementerian Luar Negeri

Survei yang tersedia:

BSKLN - Survey Indeks Kemanfaatan Diseminasi Informasi

https://survey.kemlu.go.id/

POLICY BRIEF
VOL. 11 NO. 1 | JANUARI - MARET 2026

Analisis terhadap Gagasan Mengangkat HUT Kemlu RI sebagai Hari Diplomasi Nasional Indonesia

DISETUJUI UNTUK PUBLIKASI

Ringkasan Eksekutif

Tidak sama dengan hari-hari nasional lainnya, 19 Agustus 1945 merupakan hari bersejarah yang sering luput dalam catatan dokumentasi nasional. Tanggal itu dikenal sebagai hari kelahiran atau terbentuknya Kementerian Luar Negeri. Selama beberapa dekade, 19 Agustus 1945 lebih dirayakan parsial sebagai hari ulang tahun Kemlu. Dengan background geostrategis diplomasi saat ini, 19 Agustus layak untuk di-upgrade sebagai hari Diplomasi Nasional Indonesia. Gesture ini menyiratkan pengakuan nasional terhadap peran fundamental diplomasi dalam perjuangan kemerdekaan dan penegakan kedaulatan Republik Indonesia. Tanggal itu juga menjadi momentum bagi penghormatan jasa dan martabat profesi para diplomat sebagai salah satu pilar pengabdian kepada negara. Sebagai catatan, berbagai negara di dunia telah menetapkan hari khusus untuk menghormati korps diplomatiknya. Indonesia sendiri belum memiliki momentum nasional serupa. Gagasan ini akan terasa bermakna dan relevan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menlu Sugiono yang sekaligus menjadi legacy berdua. Apalagi Presiden Prabowo dikenal luas sebagai figur militer yang sangat internationalist. Selain itu, penetapan Hari Diplomasi Indonesia tidak hanya akan memperkuat memori kolektif bangsa. Tetapi juga menjadi simbol penghormatan negara terhadap kontribusi para diplomat sebagai garda terdepan perjuangan kepentingan nasional.

I. Latar Belakang

1. Bulan Agustus merupakan bulan sakral bagi bangsa Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Dalam tradisi keluarga besar Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dua hari setelah tanggal itu juga dirayakan sebagai Hari Ulang Tahun Kemlu. Hari yang dirujuk yaitu 19 Agustus 1945 merupakan tanggal Departemen Luar Negeri (nama yang dipakai ketika itu) didirikan dengan mengangkat Achmad Soebardjo sebagai Menteri Luar Negeri pertama.
2. Sebelum dan sesudah 17 Agustus, dunia diplomasi Indonesia sarat dengan peristiwa-peristiwa penting perundingan masa depan negeri ini. Pendek kata, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari upaya yang dilakukan para diplomatnya di panggung internasional. Dalam berbagai perundingan, diplomasi beresenansi lebih dari sekedar pelengkap perjuangan bersenjata. Diplomasi bahkan menjadi instrumen utama kemerdekaan seperti highlight peristiwa-peristiwa penting dibawah ini:
   - Perjanjian Linggarjati (1946) : Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatra.
   - Berbagai Perundingan di PBB akibat Agresi Militer I (1947) dan II (1948): Berhasil membawa masalah Indonesia menjadi pembahasan PBB. Badan dunia itu membentuk Committee of Good Offices sebagai mediator dan United Nations Commission for Indonesia untuk mengawasi proses penyelesaian konflik. Tekanan internasional terhadap Belanda semakin kuat sehingga penyelesaian melalui perundingan menjadi tidak terhindarkan.
   - Perjanjian Roem-Rojen (1949): Titik balik menuju penyelesaian akhir konflik.
   - Memuncak hingga Konferensi Meja Bundar 1949 yang ditandai penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia sekaligus menyudahi perdebatan keabsahan kedaulatan Republik Indonesia.
3. Pada tataran praktis, kiprah para diplomat dalam menggalang dukungan dan pengakuan kedaulatan dari berbagai negara di masa perjuangan kemerdekaan juga tidak kalah vitalnya. Beberapa contoh negara yang digarap diplomat Indonesia sejak awal dan memberikan pengakuan dini, antara lain:
   - Mesir sebagai salah satu negara pertama memberikan pengakuan de jure kepada Republik Indonesia (1947).

- Suriah, Lebanon, Irak, Arab Saudi, Yaman dan Afghanistan kemudian turut mengakui kemerdekaan Indonesia serta memberikan dukungan diplomatik penuh di berbagai forum internasional.
- India secara aktif mendukung melalui kerja sama politik dan diplomatik, termasuk penyelenggaraan Konferensi Hubungan Asia di New Delhi (1947).

4. Sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan hingga saat ini, juga tidak bisa lepas dari peran aktif para diplomatnya melalui berbagai inisiatif penting dan strategis, antara lain:

- Konferensi Asia Afrika tahun 1955: Indonesia menginspirasi perjuangan kemerdekaan berbagai bangsa di dunia.
- Doktrin Bebas Aktif: Indonesia ikut mendirikan Gerakan Non Blok di tengah ketegangan Perang Dingin dan juga OKI sebagai konsolidasi suara populasi muslim di dunia.
- Pendirian berbagai organisasi regional seperti ASEAN dan organ turunannya dengan berbagai inisiatif terkini, APEC, RCEP, IORA dan berbagai inisiatif lainnya sebagai bentuk tanggung jawab stabilitas dan keamanan kawasan.

5. Selama 81 tahun berdiri, perayaan HUT Kemlu masih sebatas "Syukuran Keluarga Deplu" dan hanya dirasakan kalangan Pejambon. Berbeda dengan HUT TNI dan Hari Bhayangkara Polri yang selalu menyita perhatian nasional. Hingga saat ini belum ada momentum peringatan upaya perjuangan diplomasi dengan magnitude yang bersifat nasional. Sementara pada sisi lain, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan para Bapak Bangsa dan juga perjuangan para diplomat Indonesia.
6. Apalagi dalam konteks konstitusional, kedudukan Kemlu sebagai lembaga triumvirat dan bagian Kementerian Kelompok 1 dengan urusan absolutnya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, K/L dibagi dalam kategori Kelompok 1, Kelompok II dan Kelompok 3. K/L pada Kelompok 1 merupakan K/L yang nomenklaturnya disebutkan langsung dalam UUD sekaligus dikenal sebagai triumvirat. Dalam kategori ini selain Kemlu, juga ada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Seluruh Kementerian ini menangani atau memegang urusan absolut. Selain itu, penguatan status diplomat dalam dunia profesi di tanah air telah dilakukan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat. Sebagai wadah profesi yang secara resmi menaungi, dibentuk Asosiasi Diplomat Indonesia (ADI).

Selain itu, status diplomat sebagai ASN juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, penetapan Hari Diplomasi negara secara resmi akan merawat ingatan kolektif bahwa diplomasi merupakan salah satu instrumen utama yang memastikan jalannya kedaulatan negara Republik Indonesia dan terbentuknya visibility pemerintah secara internasional.

7. Pemerintah hingga saat ini telah menetapkan beberapa tanggal sebagai hari peringatan profesi yang rutin diperingati setiap tahun. Sebagian merupakan hari profesi yang ditetapkan melalui keputusan pemerintah atau organisasi profesi. Sebagian lainnya telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Beberapa hari dimaksud antara lain:

Tanggal	Hari Peringatan	Dasar Hukum/Penetapan
9 Februari	Hari Pers Nasional	Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.
13 Februari	Hari Persatuan Farmasi Indonesia (PAFI)	Diperingati berdasarkan berdirinya Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) pada 13 Februari 1946 di Yogyakarta.
17 Maret	Hari Perawat Nasional	Diperingati berdasarkan hari berdirinya Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) pada 17 Maret 1974.
18 Maret	Hari Arsitektur Indonesia	Diperingati berdasarkan hari lahir Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) pada 18 Maret 1959.
6 April	Hari Nelayan Indonesia	Diperingati berdasarkan tradisi organisasi nelayan dan pemerintah daerah.
1 Mei	Hari Buruh Internasional	Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional.
24 Juni	Hari Bidan Nasional	Diperingati berdasarkan hari berdirinya Ikatan Bidan Indonesia (IBI) pada 24 Juni 1951.
1 Juli	Hari Bhayangkara (Polisi)	Berasal dari Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946 tentang pembentukan Kepolisian Negara; diperingati sebagai Hari Bhayangkara.
22 Juli	Hari Kejaksaan	Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-196/JA/7/1985
1 September	Hari Polisi Wanita (Polwan)	Diperingati berdasarkan lahirnya Polisi Wanita pertama pada 1 September 1948.
24 September	Hari Tani Nasional	Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963 tentang Hari Tani Nasional.
26 September	Hari Statistik	Diperingati oleh BPS berdasarkan terbitnya UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik; tidak ditetapkan melalui Keppres.
5 Oktober	Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI).	Penetapan Pemerintah Tahun 1946 No. 7/Um (4 Oktober 1946) yang Menetapkan 5 Oktober sebagai Hari Peringatan Angkatan Perang. Keputusan Presiden RI No. 212 Tahun 1965 mengubah 5 Oktober menjadi Hari Peringatan Angkatan Bersenjata. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai dasar hukum penyelenggaraan TNI.
24 Oktober	Hari Dokter Nasional	Tidak ada Keppres. Diperingati berdasarkan hari berdirinya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada 24 Oktober 1950.
25 November	Hari Guru Nasional dan HUT PGRI	Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional; bertepatan dengan HUT PGRI.

8. Penetapan Hari Diplomasi Nasional melalui Keppres tidak hanya akan melegitimasi Hari Diplomasi dalam kalender nasional. Namun hal itu akan membuatnya setara dengan profesi lainnya seperti diurai pada poin 7. Sekaligus pula memastikan bahwa sumbangsih historis serta peran krusial para diplomat diakui, dihormati dan dirayakan secara resmi dalam kalender nasional.

II. Pembahasan/Substansi

→ **Adakah Hari Diplomasi di PBB?**

9. Pertimbangan tentang pentingnya peringatan Hari Diplomasi Nasional oleh Indonesia mengacu pada praktik dan kebiasaan di beberapa negara. Bahkan dalam konteks lebih luas, wacana seperti ini juga berkembang secara multilateral. Hingga saat ini memang belum ada secara spesifik peringatan hari diplomasi di PBB. Tetapi meskipun demikian, terdapat 2 (dua) hari penting yang diakui dan diperingati secara khusus oleh PBB dan bersinggungan dengan aktivitas diplomasi yaitu:
   - International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace diperingati setiap 24 April
   - International Day of Women in Diplomacy diperingati setiap 24 Juni
10. Pada tahun 2017 pernah diusulkan peringatan International Day of Diplomats setiap tanggal 24 Oktober bertepatan dengan HUT Piagam PBB. Usulan ini merupakan inisiatif beberapa negara yaitu Brazil, Bangladesh, Perancis, Ghana, India, Israel, Italia, Meksiko, Afrika Selatan and Turkiye. Usulan ini kurang memperoleh respons positif di PBB karena dikhawatirkan akan mengurangi kesakralan HUT Piagam PBB sendiri.

→ **Peringatan Hari Diplomasi di beberapa Negara**

11. Sebagai record, beberapa negara telah menetapkan hari khusus untuk menghormati korps diplomatiknya. Berikut hasil penelusurandari praktik hari diplomasi atau peringatan profesi diplomat secara nasional di beberapa negara:

Negara	Tanggal	Nama Peringatan	Dasar/Signifikansi
India	9 Oktober	*Indian Foreign Service Day*	Memperingati pembentukan korps diplomatik dan kontribusi para diplomat India/ *Indian Foreign Service* dalam memperjuangkan kepentingan nasional India di dunia internasional. Setiap tahun, IFS Day biasanya diisi dengan: • Upacara dan pertemuan para diplomat aktif dan purna tugas, • Pesan resmi dari Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri India, • Seminar dan diskusi mengenai diplomasi India, • Penghormatan kepada para diplomat yang berjasa.
Rusia	10 Februari	*Diplomatic Worker's Day*	Hari profesi diplomat Rusia. Ditetapkan melalui Dekrit Presiden tahun 2002. Pemilihan tanggal dikaitkan dengan pembentukan *Posolsky Prikaz* tahun 1549 sebagai lembaga diplomasi pertama dan dianggap cikal bakal Kementerian Luar Negeri Rusia. Bentuk kegiatan: • Upacara resmi di Kementerian Luar Negeri Rusia, • Pidato Menlu yang menyoroti pencapaian diplomasi Rusia serta tantangan kebijakan luar negeri ke depan, • Pesan ucapan dan selamat dari Presiden Rusia kepada para diplomat dan pegawai dinas luar negeri, • Penganugerahan penghargaan negara dan penghargaan kementerian, • Peletakan bunga di memorial diplomat mengenang para diplomat Rusia yang gugur atau berjasa dalam menjalankan tugas negara, • Resepsi, • Publikasi sejarah diplomasi Rusia.
Bangladesh	18 April	*Foreign Ministry Day*	Untuk memperingati peristiwa pengibaran bendera di Bangladesh Mission, Kolkata pada tahun 1971. Wakil komisaris tinggi di Kolkata saat itu, M Hossain Ali, bersama 65 pejabat dan staf misi, menyatakan kesetiaan mereka kepada pemerintah Mujibnagar dengan mengibarkan bendera tersebut.
Brasil	20 April	*Dia do Diplomata*	Bertepatan dengan hari lahir *Baron of Rio Branco*, patron diplomasi Brasil. Tokoh ini dianggap berhasil menyelesaikan hampir seluruh sengketa perbatasan secara damai melalui negosiasi dan arbitrase internasional. Capaian itu yang membentuk batas wilayah Brasil modern seperti saat ini.
Meksiko	8 November	*Día del Diplomático Mexicano*	Hari penghormatan bagi anggota *Servicio Exterior Mexicano (Corps Diplomatic* Meksiko). Bertepatan dengan tanggal pembentukan lembaga luar negeri Meksiko pada 8 November 1821. Ditetapkan dengan Dekrit Presiden Meksiko tahun 2018.
Peru	3 Agustus Dan 31 Juli	*Día del Diplomático* dan Hari jadi *Servicio Diplomático y Consular del Perú*	Hari Diplomat dan Ulang Tahun Kemlu dirayakan secara terpisah: 3 Agustus → Hari Diplomat Peru yang diperingati secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri bersamaan dengan hari jadi kementerian. 31 Juli → Hari jadi *Servicio Diplomático y Consular del Perú*, yang diperingati terutama oleh korps diplomatik dan asosiasi diplomat.

Negara	Tanggal	Nama Peringatan	Dasar/Signifikansi
Kazakhstan	2 Juli	*Diplomatic Service Day*	Hari profesi resmi bagi korps diplomatik Kazakhstan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Kazakhstan pada tahun 2009. Tanggal itu sekaligus ditetapkan sebagai hari libur profesional (*professional holiday*) bagi para diplomat Kazakhstan.
Ukraina	22 Desember	*Day of Diplomatic Service Workers*	Bertepatan dengan pembentukan Sekretariat Umum Urusan Luar Negeri Republik Rakyat Ukraina pada 22 Desember 1917. Hari profesi ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Ukraina No. 1639/2005 tanggal 21 November 2005.
Belarus	22 Januari	*Diplomatic Workers' Day*	Hari peringatan profesi bagi pegawai diplomatik Belarus. Setiap tahun, Presiden Belarus menyampaikan ucapan selamat kepada diplomat aktif maupun purnabakti pada kesempatan tersebut.
Azerbaijan	9 Juli	*Diplomatic Service Day*	Hari profesi pegawai dinas diplomatik. Tanggal 9 Juli dipilih untuk memperingati berdirinya dinas diplomatik Azerbaijan pada tahun 1919. Bentuk Kegiatan: a) Penyampaian ucapan selamat dari Presiden Republik Azerbaijan dan Menteri Luar Negeri, b) Upacara penghargaan bagi diplomat dan pegawai Kementerian Luar Negeri, c) Kegiatan yang menyoroti sejarah, capaian, dan kontribusi diplomasi Azerbaijan dalam hubungan internasional.
Turkmenistan	18 Februari	*Day of Diplomatic Workers*	Hari profesi bagi pekerja/diplomat Turkmenistan.
Moldova	17 Januari	*Diplomat's Day*	Diperingati oleh Kementerian Luar Negeri Moldova sebagai Hari Diplomat.
Rumania	1 September	*Romanian Diplomacy Day*	Hari Diplomasi Rumania diperingati setiap 1 September, bertepatan berdirinya institusi diplomasi modern Rumania pada 1 September 1862. Pada tanggal itu, Kemlu Rumania menyelenggarakan penyampaian pesan Menteri Luar Negeri, pemberian penghargaan kepada diplomat, serta kegiatan yang menyoroti sejarah dan pencapaian diplomasi Rumania.
Bulgaria	19 Juli	*Diplomatic Service Day*	Peringatan pembentukan Kementerian Luar Negeri Bulgaria. Ditetapkan sebagai Hari Profesi sejak tahun 1999. Pada peringatannya, Kemlu Bulgaria menyelenggarakan resepsi resmi, penyampaian pesan Menlu, pemberian penghargaan kepada diplomat, serta

Negara	Tanggal	Nama Peringatan	Dasar/Signifikansi
			kegiatan yang menyoroti sejarah dan pencapaian diplomasi Bulgaria.
Georgia	3 Mei	*Diplomat's Day*	Hari profesi sebagai penghormatan terhadap dinas diplomatik Georgia dan diperingati secara resmi sejak tahun 2004. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Sulkhan-Saba Orbeliani (1658–1725), seorang negarawan, penulis, dan diplomat terkemuka dalam sejarah Georgia. Orbeliani dikenal karena misi diplomatiknya ke Eropa untuk mencari dukungan internasional bagi Kerajaan Georgia. Peringatan Hari Diplomat Georgia umumnya diisi dengan: a) Upacara resmi yang diselenggarakan Kemlu Georgia, b) Penyampaian pidato oleh Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri Luar Negeri Georgia, c) Pemberian penghargaan kepada diplomat dan pegawai dinas luar negeri yang berprestasi, d) Pertemuan dengan diplomat aktif maupun purna tugas, e) Kegiatan akademik yang membahas sejarah dan tantangan diplomasi Georgia.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Kuesioner Kementerian Luar Negeri

Survei yang tersedia:

BSKLN - Survey Indeks Kemanfaatan Diseminasi Informasi

https://survey.kemlu.go.id/